



## **BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO**

### **PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 23 TAHUN 2020**

#### **TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017-2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOALEMO,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil reviu terhadap Indikator Kinerja Utama Pemerintah daerah Kabupaten Boalemo oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah, perlu melakukan perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77,

KABAG HUKUM	DINASBAGAN KABUPATEN	ASS II	SEKDA	WABUP

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara

KABAG HUKUM	DINAS HUKUM	ASS II	SEKDA	WABUP
f	V	+	+	+



Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

KABAG HUKUM	DINASBADAN MASTOR	AB3 N	SEKDA	WASUP
				

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 291);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 303);
15. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 41 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2020 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 716);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017-2022

#### **Pasal 1**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 668) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

Perubahan isi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.





**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO**

**NOMOR : 23 TAHUN 2020**

**TANGGAL : 3 Februari 2020**

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017-2022**

NO	Visi	KABUPATEN BOALEMO YANG DAMAI, CERDAS, SEJAHTERA DALAM SUASANA YANG RELIGIUS TAHUN 2022								
I	Misi	1	Mewujudkan Kabupaten Baolemo Yang Damai							
I.I	Tujuan	1,1	Menciptakan suasana Kedamaian dari aspek keamanan, Ketertiban umum, Ketentraman dan perlindungan sosial							
	Sasaran	1.1.1	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat							
	Indikator Sasaran			Formula Pengukuran	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
		1.1.1.1	Presentase Penurunan Gangguan Kantibmas	Jumlah Gangguan Kantibmas Tertangani Tahun (n) : Jumlah Gangguan Kantibmas Tertangani Tahun Sebelumnya (n-1) x 100	%	75	70	65	60	55
		1.1.1.2	Persentase Permasalahan Hukum yang terselesaikan	Jumlah Masalah Hukum yang di selesaikan : Jumlah Masalah Hukum x 100	%	80	85	90	90	95
	Nama Program	1	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan							
		2	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat							
I.II	Tujuan	1,2	Meningkatkan suasana kedamaian dari aspek keadilan pelayanan pemerintahan							
	Sasaran	1.2.1	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan daerah yang baik dan bersih, disertai penerapan e-government yang terintegrasi dalam memberikan Pelayanan bagi masyarakat							
	Indikator Sasaran			Formula Pengukuran	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
		1.2.1.1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	(Tinggi dan Sangat Tinggi)	Nilai	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		1.2.1.2	Nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja	Nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja	Nilai	B	B	B	B	B
		1.2.1.3	Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas SPIP	Nilai	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

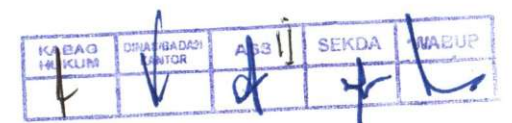


		1.2.1.4	Persentase OPD yang menerapkan teknologi informasi	Jumlah SOPD yang telah memiliki Jaringan tersentralisasi : Jumlah SOPD Se Kabupaten X 100%	%	80	85	85	90	95
		1.2.1.5	Opini/Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		1.2.1.6	Indeks Reformasi Birokrasi	Sesuai Permenpan No 30 2018	Nilai	45	50	57	68	75
		1.2.1.7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	hasil survey yang di capai mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Masyarakat	Skala	3	3,3	3,5	3,8	4
	Nama Program	1	Program Penataan Daerah Otonomi Baru							
		2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
		3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah							
		4	Program Informasi dan Komunikasi Publik							
		5	Program Pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa							
		6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah							
		7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur							
		8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Perizinan							
		9	Program Penataan Administrasi Kependudukan							
		10	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							
		11	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan prasarana Rumah Sakit / Rumas Sakit Jiwa / Rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata							
I.III	Tujuan	1,3	<b>Mewujudkan suasana kenyamanan atas Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat</b>							
	Sasaran	1.3.1	<b>Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat</b>							
				Formula Pengukuran	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022

KABAG HUKUM	DAN BADAN TOR	ASS II	SEKDA	WABUP



	Indikator Sasaran	1.3.1.1	Usia Harapan Hidup	jumlah umur kematian pada seluruh total kematian yang terjadi pada suatu wilayah pada periode tertentu : jumlah kasus kematian seluruh pada suatu wilayah pada periode yang sama X 100 %	%	68,5	68,7	68,9	69	69,2
		1.3.1.2	Angka Kematian Ibu Melahirkan (/ 100.000 KH)	jumlah kematian ibu selama hamil, waktu persalinan dan masa nifas : jumlah kelahiran hidup di wilayah tertentu X 100.000 KH	%	283	242	202	161	121
		1.3.1.3	Angka Kematian Bayi (/ 1.000 KH)	jumlah kematian bayi/ infant mortality rate (IMR) berumur kurang dari 1 tahun pada satu tahun tertentu : jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu X 1000 KH	%	13,8	9,7	8,9	8,5	8,1
		1.3.1.4	Prevalensi kekurangan Gizi pada anak balita	jumlah anak balita yang mengalami kekurangan gizi : jumlah seluruh anak balita X 100 %	%	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14
	Nama Program	1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							
		2	Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak							
		3	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak Balita							
		4	Program Perbaikan Gizi Masyarakat							
	Sasaran	1.3.2	Terwujudnya kawasan perumahan, permukiman yang sehat							
				Formula Pengukuran	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022



	Indikator Sasaran	1.3.2.1	Persentase Lingkungan Perumahan yang sehat ditudukung PSU	Jumlah rumah tinggal yang didukung PSU : Jumlah Rumah di Kabupaten Boalemo x 100%	%	55	60	65	70	75
		1.3.2.2	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang semakin menurun	Jumlah rumah layak huni yang terbangun : Jumlah rumah yang tidak layak huni di Ksb. Boalemo x 100%	%	0,75	0,70	0,65	0,60	0,50
	Nama Program	1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah							
		2	Program Pembangunan Infrastruktur Desa							
		3	Program Lingkungan Sehat Perumahan							
		4	Program Pengembangan Perumahan							
	<b>Sasaran</b>		<b>1.3.3</b>	<b>Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar</b>						
	Indikator Sasaran			Formula Pengukuran	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
		1.3.3.1	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik : jumlah seluruh jembatan kabupaten X 100	%	49	50	51	52	53
		1.3.3.2	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik : Panjang seluruh jalan kabupaten X 100	%	47	50	55	60	70
		1.3.3.3	Cakupan Luas Areal Sawah yang bisa dialiri	Luas Areal Sawah yang bisa dialiri : Luas Areal Sawah X 100	%	59,5	65,5	71,5	77,5	83,5
	Nama Program	1	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan							
		2	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan							
		3	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan							
		4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan							
		5	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya							
II	Misi	2	<b>Mewujudkan Kabupaten Boalemo Yang Cerdas</b>							
II.I	Tujuan	2,1	<b>Meningkatkan Kualitas SDM</b>							



	<b>Sasaran</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pendidikan</b>							
	Indikator Sasaran			Formula Pengukuran	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
		2.1.1.1	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Kombinasi antar partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang duduki dan pendidikan yang ditamatkan	Tahun	8,5	8,9	9	9,5	10
		2.1.1.2	Persentase Kelulusan	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI,SMP/MTS,SMA/SMK/MA : Jumlah siswa tertinggi pada jenjang SD/MI,SMP/MTS,SMA/SMK/MA pada tahun sebelumnya X 100 %	%	100	100	100	100	100
	Nama Program	1	Program pendidikan anak usia dini							
		2	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun							
III	<b>Misi</b>	<b>3</b>	<b>Mewujudkan Kabupaten Baolemo Yang Sejahtera</b>							
III.I	<b>Tujuan</b>	<b>3,1</b>	<b>Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Masyarakat</b>							
	<b>Sasaran</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Terbinanya Pemberdayaan UMKM</b>							
	Indikator Sasaran			Formula Pengukuran	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
		3.1.1.1	Persentase peningkatan omzet UMKM	Jumlah UMKM yang meningkat omsetnya : Jumlah UMKM x 100	%	50	<b>55</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>70</b>
	Nama Program	1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif							
		2	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah							
		3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro Kecil Menengah							
		4	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah							
		5	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koprasi							
	<b>Sasaran</b>	<b>3.1.2</b>	<b>Meningkatkan Pendapatan dan daya beli masyarakat Petani dan Nelayan</b>							
				Formula Pengukuran	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022

KABAG HUKUM	DINAS BADA MONITOR	ASST	SEKDA	WABUP

	Indikator Sasaran	3.1.2.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks yang diterima petani : Indeks yang dibayar petani X 100	%	106	106	107	107	107	
		3.1.2.2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks yang diterima nelayan : indeks yang di bayarkan nelayan X 100	%	108,09	108,32	108,55	108,78	109,01	
	Nama Program	1	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan								
		2	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan								
	Sasaran	3.1.3	Menurunnya Angka kemiskinan								
	Indikator Sasaran			Formula Pengukuran	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	
		3.1.3.1	Angka Kemiskinan	Jumlah Angka Kemiskinan : Jumlah Angka Penduduk	Angka	20,86	20,61	20,36	20,11	19,86	
	Nama Program	1	Program Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial bagi PMKS								
III.I	Tujuan	3,2	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah dan Masyarakat								
	Sasaran	3.2.1	Meningkatnya Daya Ungkit Baru Sektor Pariwisata								
	Indikator Sasaran			Formula Pengukuran	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	
		3.2.1.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisata mancanegara ditambah dengan jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Wisatawan Nusantara	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	
					Wisatawan Manca negara	2.500	3.500	4.500	5.500	6.500	
	Nama Program	1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata								
		2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata								

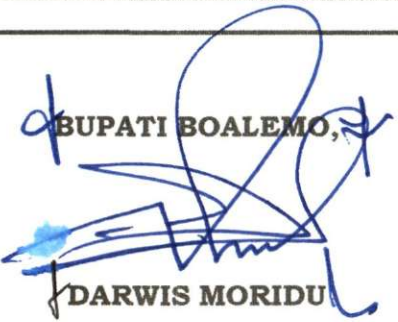
KABAG HUKUM	DIBAG KANDUR	ASS	SEKDA	WAGUP



<b>III.I</b>	<b>Tujuan</b>	<b>3,3</b>	<b>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Masyarakat</b>							
	<b>Sasaran</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan</b>							
				Formula Pengukuran	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
	Indikator Sasaran	3.3.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	Angka tahun pengamatan PDRB - angka tahun pengamatan PDRB sebelumnya : angka tahun pengamatan PDRB sebelumnya X 100	%	6,39	6,49	6,59	6,69	19,86
	Nama Program	1	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh							
		2	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekpor							
		3	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan							
<b>IV</b>	<b>Misi</b>	<b>4</b>	<b>Mewujudkan Kabupaten Baolemo Yang Relegius</b>							
<b>IV.I</b>	<b>Tujuan</b>	<b>4,1</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketakwaan bagi Pemeluk Agama</b>							
	<b>Sasaran</b>	<b>4.1.1</b>	<b>Meningkatnya aktifitas Peribadatan</b>							
				Formula Pengukuran	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
	Indikator Sasaran	4.1.1.1	Persentase Sarana Peribadatan yang makmur	Jumlah sarana peribadatan yang aktif : jumlah sarana ibadah se-Kab. Boalemo X 100 %	%	75	80	85	90	100
	Nama Program	1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan							
	<b>Sasaran</b>	<b>4.1.2</b>	<b>Meningkatnya kualitas Pendidikan Agama dengan Sistem Non Formal yang berbasis masyarakat</b>							
				Formula Pengukuran	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
	Indikator Sasaran	4.1.2.1	Persentase Siswa Tingkat SD dan Menengah yang Melek Huruf Al-Quran	Jumlah Siswa yang dapat Baca Tulis Al-Quran (TBTQ) : Jumlah SD dan SMP x 100 %	%	60	65	70	75	80

KABAG HUKUM	DINASAGAN KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP
				

		4.1.2.2	Jumlah Santri	Santri adalah masyarakat yang mendapat pendidikan agama formal dan non formal	Santri	7000	7000	7000	7000	7000
	Nama Program	1	Program Pendidikan Non Formal							
		2	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan							

  
 BUPATI BOALEMO,  
 DARWIS MORIDU



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal 3 Februari 2020

  
**BUPATI BOALEMO**

**DARWIS MORIDU**

Diundangkan di Tilamuta

Pada Tanggal 3 Februari 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,**

  
**H.A ETANGO**

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR 23 )